

BAB III

EVALUASI PROGRAM PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016

Pada bagian pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini di peroleh dari data primer maupun sekunder, serta hasil yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan program ini dan pengamatan langsung dilapangan sehingga penulis mengetahui sebenarnya pelaksanaan program dialapangan selama ini, serat dokumen yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

Seluruh data yang berasal dari penelitian akan disajikan dan kemudian dianalisis secara evaluative agar dapat di ketahui sejauh mana keberhasilan dari Program Pemuagan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut dalam mengatasi masalah kemiskinan.

A. Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara

evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai suatu program yang telah dilaksanakan, mengenai keberhasilan suatu program dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan. Tujuan evaluasi adalah memperoleh keterangan tentang tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari pelaksanaan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sasaran Evaluasi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara sebagai penanggung jawab/pelaksana dan pendamping kegiatan program tersebut. Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi bahwa pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 telah melakukan pemugaran sebanyak 1250 unit rumah yang terbagi menjadi 250 kelompok dengan biaya berasal dari dana APBD II Murni maupun Perubahan, yang di bantu dengan CSR dan Dinas-dinas terkait untuk melaksanakan pemugaran. Dalam laporan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) dari 250 kelompok terdapat 76 kelompok yang belum melaporkan hasil pemugaran dengan alasan yang belum dapat diketahui. Dalam pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) dilapangan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam Evaluasi program di antaranya meliputi :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Ketepatan

dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 adalah sebagai berikut

1. Efektifitas

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan satu program yang telah dijalankan, efektif atau tidak sebuah sasaran yang di tuju. Efektif merupakan cerminan apakah hasil yang diharapkan setelah mencapai tujuannya sudah tepat guna atau bermanfaat. Alternative kebijakan pemberian bantuan secara tepat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui pemberian informasi terkait program kebijakan, tujuan dari program serta manfaat dari program.

Berdasarkan maksud dari tujuan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) menurut tim pelaksana program rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten Banjarnegara, tujuan dari program rumah tidak layak hunu (RTLH) adalah tersedianya perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin, adanya kenyamanan tempat

tinggal, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat. Kualitas hidup yang di harapkan adalah dengan kondisi rumah dan lingkungan yang bersih dan asri, tidak ada atap yang bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah. Selain itu program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan program pengentasan kemiskinan yang di khususkan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara. Dapat dilihat kriteria efektifitas pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.1
Kriteria Efektifitas

No	Indikator	Desa	Sudah	Cukup	Belum
1	Hasil sesuai dengan tujuan	Gunung Langit	√		
		Karanggondang	√		
2	Program yang di jalankan sesuai dengan kebutuhan	Gunung Langit	√		
		Karanggondang	√		
3	Dilihat dari manfaat program bagi masyarakat	Gunung Langit	√		
		Karanggondang	√		

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan data di atas pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara tahun sudah dapat di nyatakan efektif, dilihat dari hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program yaitu memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Kesesuaian isi dan tujuan pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) yaitu untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

Program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) yang di khususkan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara, untuk membantu masyarakat agar menempati tempat tinggal yang

lebih layak, kebutuhan masyarakat merasa terpenuhi dengan adanya bantuan ini sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan adanya binatang-binatang yang mudah masuk ke dalam rumah, bantuan itu juga dapat dirasakan langsung oleh penerima sehingga kenyamanan tempat tinggal dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dapat teratasi.

Pernyataan di atas senada dengan yang dikatakan oleh ibu Ratih Pudji Astuti S.sos., selaku penanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa:

“dengan adanya program ini yang jelas masyarakat sangat terbantu sekali, karena secara langsung masyarakat dapat imbasnya. Program ini adalah salah satu untuk menangani kemiskinan, dari tahun ketahun dengan adanya program ini si alhamdulillah rumah yang tidak layak huni semakin berkurang ya, walupun di Banjarnegara sendiri rumah yang tidak layak huni masih sangat tiinggi. Setiudaknya program ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat miskin.”

Pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di dua desa tersebut bahwa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat miskin, dan bantuan tersebut dapat member manfaat kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan.

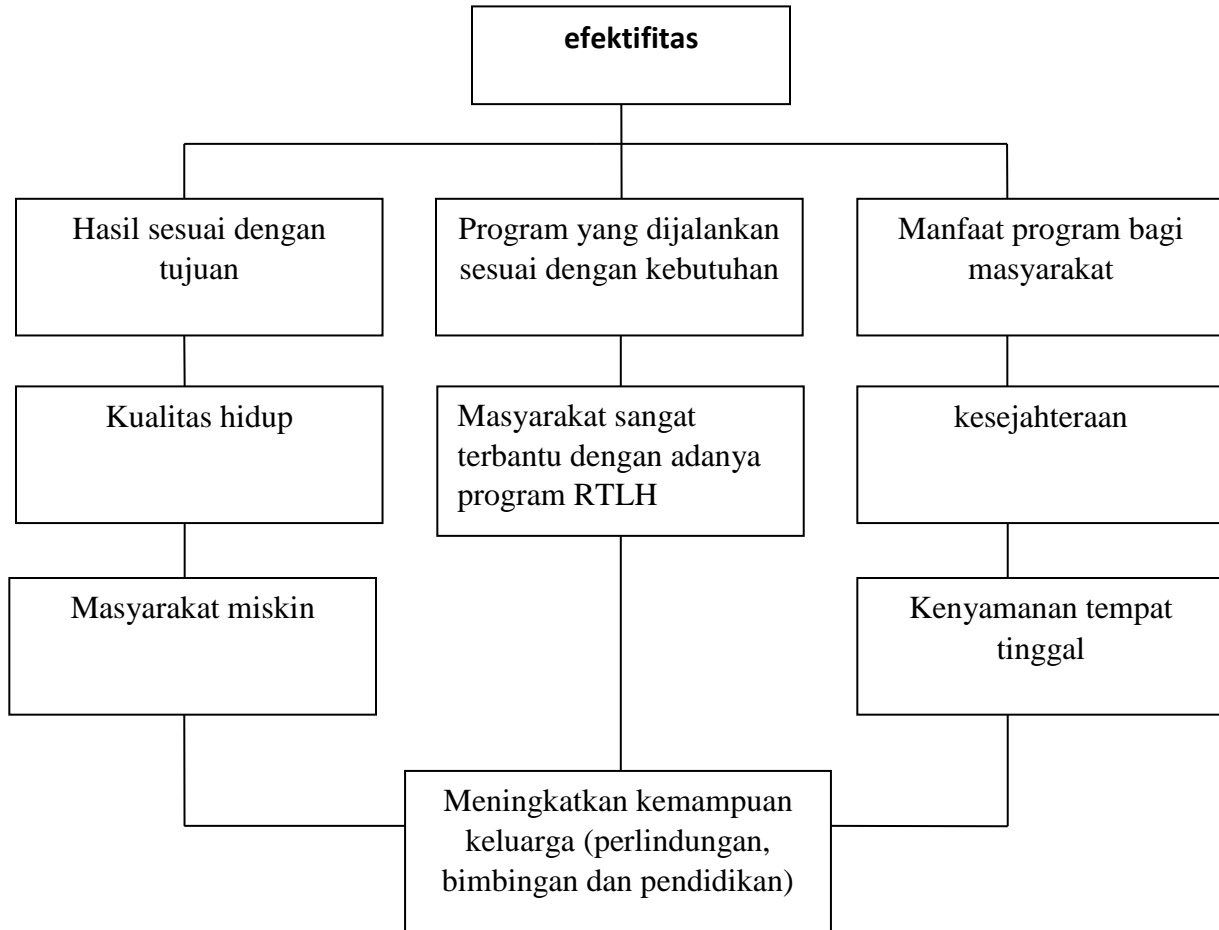
Gambar 3.1
Rumah penerima bantuan yang dijadikan Rumah baca



Sumber : langsung ambil di lapangan oleh peneliti tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa dengan bantuan pemerintah bahwa masyarakat dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, seperti halnya di desa Gunung Langit bahwa salah satu penerima bantuan pemugaran sekarang rumahnya dijadikan rumah baca untuk anak-anak dan masyarakat sekitar selain itu juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat. Dana yang diperoleh bisa untuk memperbaiki Kondisi atap yang bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk ke dalam rumah dan di tambah lagi untuk membangun jamban sehat.

Bagan 3.1
Efektifitas Program pemugaran rumah tidak layak huni
Di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016



Sumber: Diolah oleh peneliti

Dengan bagan di atas menunjukkan bahwa efektifitas program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sudah berjalan dengan baik karena hasil yang dicapai sudah menunjukkan dan dapat meningkatkan kualitas hidup

untuk masyarakat miskin, program yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk masyarakat miskin untuk mempunyai rumah yang layak huni, manfaat program tersebut bagi masyarakat dapat mensejahterakan masyarakat dalam kenyamanan tempat tinggal dan semua itu dapat disimpulkan bahwa rumah yang layak huni dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam perlindungan, bimbingan, dan pendidikan)

2. Efisiensi

Merupakan seberapa banyak anggaran yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan serta efektifitasnya tinggi dengan pengeluaran biaya terkecil. Efisiensi sama dengan jumlah anggaran yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah tingkat efektifitas tertentu. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan program rumah tidak layak huni (RTLH).

a. Sumber Anggaran Program

Dana untuk program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) berasal dari APBD murni sebesar Rp. 5.250.000.000 untuk pemugaran rumah sebanyak 700 unit yang dibagi menjadi 150 kelompok yang masing-masing yang berisikan 5 anggota, setiap kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp.35.000.000 dan disetiap rumahnya mendapatkan

RP.7.000.000. dana yang di peroleh bukan hanya dari APBD murni namun juga dari APBD perubahan, untuk bantuan dari APBD perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000, dari dana tersebut di bagikan kepada 100 kelompok yang berisikan 500 unit rumah, masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp. 7.000.000. jadi total anggaran untuk program rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp. 8.750.000.000 berasal dari APBD Murni maupun Perubahan untuk merehab 1250 unit rumah yang belum layak.

Tabel 3.2
Anggaran bantuan RTLH tahun 2016

No	Sumber anggaran	Jumlah kelompok	Jumlah rumah
1	APBD Murni Rp. 5.250.000.000	150 kelompok	750 rumah
2	APBD perubahan Rp. 3.500.000.000	100 kelompok	500 rumah
3	Total anggaran APBD Rp. 8.750.000.000	250 kelompok	1250 rumah
4	Dana Swadaya Rp. 3.364.800.000	250 kelompok	1250 rumah

*Sumber : laporan pelaksanaan kegiatan pemugaran RTLH
Kabupaten Banjarnegara tahun 2016*

- b. Prosedur Pemberian bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):
1. Pemerintah desa mengajukan permohonan/ proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 2. DISPERMADES memeriksa berkas permohonan. Jika sudah sesuai maka akan di tindak lanjuti
 3. DISPERMADES menyerahkan kepada kasi PMD yang ada di Kecamatan untuk mengidentifikasi lokasi.
 4. Kepala desa membuat surat pernyataan bahwa rumah yang di ajukan layak untuk di beri bantuan.
 5. DISPERMADES melakukan sosialisasi kepada Camat, Kasi PMD, Kepala Desa dan ketua kelompok.
 6. Setiap kelompok membuat rekening BPD jateng.
 7. DISPERMADES melaporkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk pencairan dan.
 8. Pencairan dan transfer melalui rekenening BPD jateng disetiap kelompok.
 9. Dana bantuan ke masyarakat dalam bentuk material bukan lagi uang.

Tabel 3.3
Data kondisi rumah setelah dilaksanakan pemugaran

No	Data pemugaran	
1	Lantai	123
2	Dinding	516
3	Atap	222
4	Jamban	444

Sumber: Laporan pelaksanaan kegiatan pemugaran RTLH Kabupaten Banjarnegara tahun 2016

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) paling banyak memperbaiki dindingnya, karena dinding merupakan salah satu hal yang sangat penting, sesuatu struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu area alam dari alam bebas maupun dengan ruangan lainnya. kedua adalah jamban, dengan pembangunan jamban sehat maka masyarakat akan hidup lebih sehat lagi dan mengurangi buang air besar maupun kecil di kolam atau di sungai yang sudah banyak dilakukan orang-orang perdesaan. ketiga adalah atap, atap adalah salah satu hal paling penting dalam pembuatan rumah, atap merupakan cara untuk menghindari dari terik panas matahari dan hujan agar bisa tetap nyaman di dalam rumah. Terakhir adalah lantai, dari data di atas menunjukkan bahwa lantai merupakan kebutuhan terakhir dari keempat yang harus diperbaiki, banyak masyarakat Banjarnegara

yang lebih mementingkan dinding, jamban dan atap dari pada lantai terlebih dahulu.

Kabupaten Banjarnegara merupakan peringkat ke 34 dari 35 Kabupaten di provinsi Jawa Tengah mengenai Jamban Sehat hal tersebut masih di bawah standar, sehingga bantuan yang untuk merehab rumah sebesar RP.7.000.000 bukan hanya untuk merehab rumah saja namun dipaketkan juga untuk membuat jamban sehat, dana tersebut sudah di akumulasikan RP.1.500.000 untuk pembuatan jamban dan dana Rp. 5.500.000 untuk merehab rumah, karena di pedesaan banyak sekali yang belum mempunyai jamban sehat, sehingga masyarakat kecil akan hidup lebih sehat lagi dari sebelumnya.

Gambar 3.2
Pembuatan jamban sehat



Sumber: Laporan Monev Pemugaran RTLH Tahun 2016

Seperti yang terlihat gambar di atas bahwa untuk salah satu indikator keberhasilan program pemugaran rumah tidak layak huni yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dengan membuat jamban sehat, sehingga masyarakat terjaga kesehatannya dengan buang air yang tidak sembarangan.

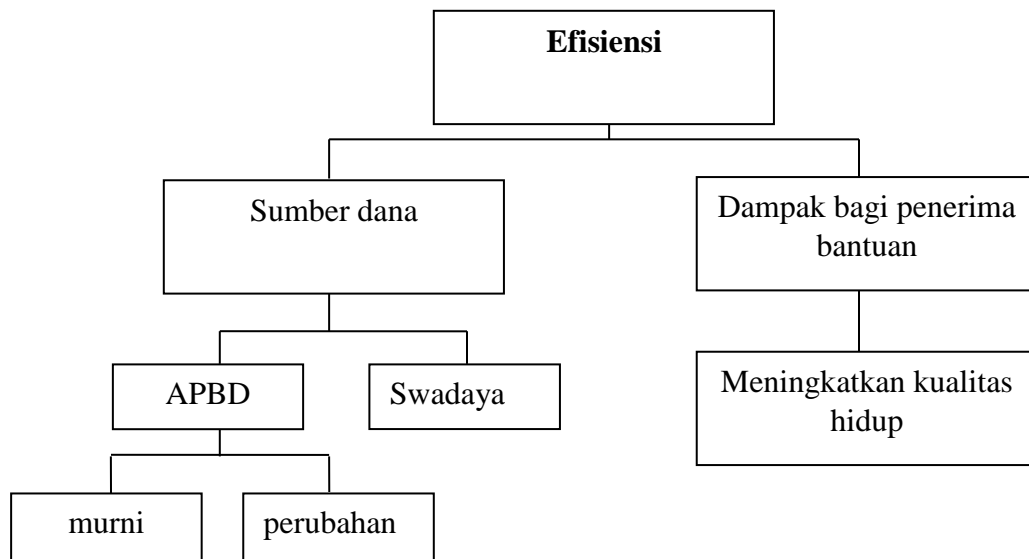
Seperti yang dikatakan oleh ibu Ratih Pudji Astuti S.sos. bahwa:

“di Jawa Tengah Banjarnegara tentang jamban sehat sendiri kan peringkat 34 dari 35 kabupaten. Masyarakat di desa banyak sekali yang belum mempunyai jamban, sekalipun masyarakat desa punya jamban/closet namun pembuangannya masih ke empang/blumbang atau sungai itu yang tidak sehat, jamban yang sehat harus membuat spiteng. dan dari dana Rp.7.000.000 itu di bagi yang Rp.1.500.000 untuk membuat spiteng dan Rp. 5.500.000 untuk memperbaiki rumah”

Selain sumber dana yang jelas, untuk sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana telah berkoordinasi dengan dibentuknya panitia pelaksana pembangunan. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana di bentuk untuk mendukung berjalannya program rumah tidak layak huni (RTLH) yang di dukung oleh SKPD terkait sebagai tim panitia yang mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi berjalannya program agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat miskin. Keberhasilan program

pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) ini tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh para pelaksana program. Salah satu strategi yang dilaksanakan salah satunya melalui sosialisasi kepada camat, kasi PMD kecamatan. , Kepala Desa dan masing-masing ketua kelompok yang mendapatkan bantuan. Tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan yang telah disepakati, strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

Bagan 3.2
Efisiensi Program pemugaran rumah tidak layak huni
di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016



Sumber: Diolah oleh peneliti

Dalam indikator efisiensi bahwa dana yang dikeluarkan untuk pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) berasal dari APBD murni

sebesar Rp. 5.250.000.000 yang terbagi menjadi 150 kelompok dan APBD perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000 untuk 100 kelompok, setiap kelompok berisi 5 penerima bantuan dan setiap penerima bantuan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 7.000.000. Ditambah lagi dengan swadaya masyarakat yang ada di daerahnya dan dampak yang diraskan masyarakat adalah dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan menguatkan pada hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. kriteria kecukupan pada program rumah tidak layak huni (RTLH) tidak hanya bagaimana pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang dijalankan mampu melaksanakan program dengan baik. Seperti keterlibatan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat terlaksana dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) melalui upaya pemberdayaan masyarakat adalah melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, yaitu

melibatkan masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan menempatkan masyarakat sebagai objek mulai dari identifikasi lokasi dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sehingga masyarakat betul-betul berperan aktif dalam setiap kegiatan. Program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara memberikan fasilitas teknis berupa bantuan sosial RTLH kepada masyarakat yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat secara gotong royong. Dalam pelaksanaannya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sekarang sudah berganti menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberi bantuan 750 unit rumah dengan bantuan sebesar Rp. 7.000.000 per-unit, secara nyata bahwa dengan dana yang di peroleh untuk masyarakat tidak mencukupi untuk memperbaiki rumah menjadi sangat layak, namun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggali kepercayaan swadaya masyarakat supaya bisa membantu untuk gotong royong dalam melaksanakan pemugaran rumah agar meringankan keluarga yang menerima bantuan sehingga dana yang diperoleh mencukupi untuk pemugaran rumah, tetapi bukan hanya swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga namun juga ada berupa material yang di mintai kepada masyarakat yang mampu supaya mendongkrak rumah yang dulunya belum layak menjadi rumah yang layak huni.

Dari wawancara dengan ibu Ratih Pudji Astuti, S.sos yang sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang pada tahun 2016 ikut bertanggung jawab dalam penanganan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengatakan bahwa:

“karena semua ini di ampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami selalu menggali kepercayaan masyarakat jadi memberdayakan masyarakat, jadi uang 7 juta itu kalo secara nyata memang tidak mencukupi tapi karena kami yang mengelola dari Dinas Pemberdayaan ini memberdayakan dari masyarakat berupa gotong royong itu tenaganya tidak di bayarkan itu yang dari swadaya masyarakat, yang kedua kalo di disekitar ada orang yang mampu dimintai barang apa yang dibutuhkan agar bisa mendongkrak yang tadinya rumah belum layak menjadi rumah yang layak huni”

Tabel 3.4
Indikator Kecukupan rumah tidak layak huni

No	Indikator	Desa Gunung Langit	Desa Karanggondang
1	pencapaian sasaran	Dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal,meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan dapat memberikan kondisi atap tidak ada yang bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah.	Dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal,meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan dapat memberikan kondisi atap tidak ada yang bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah.

2	besaran dana	Bantuan sebesar 7 juta dianggap kurang untuk melakukan pemugaran, karena swadaya tenaga maupun material sangat rendah.	Bantuan 7 juta cukup untuk melakukan pemugaran karena swadaya di desa tersebut masih sangat tinggi
3	strategi yang dijalankan	Mengandalkan tenaga sendiri dan pemerintah desa karena swadaya tenaga untuk gotong royong dari masyarakat sudah mulai hilang	Mengandalkan swadaya masyarakat sehingga tukang tidak lagi membayar

Sumber: diolah langsung oleh peneliti

Dalam melaksanakan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) supaya berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan tentu saja ada strategi khusus yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seperti halnya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu memberi trik/strategi kepada pemerintah desa yaitu sebelum mengusulkan proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pihak Desa harus melakukan pendekatan dulu kepada orang atau keluarga yang rumahnya akan di pugar ataupun di perbaiki, apakah keluarga tersebut sudah siap melakukan pemugaran atau memperbaiki rumahnya jika sudah siap pemerintah desa melakukan penghitungan material yang calon penerima bantuan punya, maka kekurangan untuk

melaksanakan pemugaran dengan dana yang di bantu oleh pemerintah sebesar 7 juta.

pemerintah juga harus melihat swadaya masyarakat sekitar ada atau tidak untuk membantu dalam pelaksanaan pemugaran rumah, dan juga memiliki keluarga seanak mapun saudara untuk memperlancar pelaksanaan program ini, itu trik yang diterapkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun jika hal tersebut tidak dilaksanakan ataupun trik itu tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat maka itu semua menjadi tanggung jawab Kepala Desa setempat agar membantu keluarga yang mendapatkan bantuan, tentu saja jika swadaya masyarakat setempat tidak ada bantuan dana bantuann yang diperoleh akan kepotong untuk membayar tukang, sehingga rumah yang di pugar akan sulit untuk menjadi layak huni.

Dalam wawancara dengan ibu Ratih pudji Astuti, S.sos mengatakan bahwa:

“kalo uang 7 juta, didaerah itukan masing-masing tidak sama, untuk tingkat gotong royongnya kan tidak sama, ada desa yang mengkota sudah tidak ada gotong royong semuanya dinilai dengan uang, itu kan karena itu. Tapi juga ada desa yang swadayanya itu juga ada, makanya untuk biar ini RTLH itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kami sehingga kami memberikan trik-trik kepada desa, jadi pada waktu sebelum mengusulkan RTLH ini Pemerintah Desa harus pendekatan dulu sama yang mau dipugar, setelah itu nanti ditanyai mau buat rumah kaya apa dan diitung bahan yang udah ada dan sisanya dengan dan 7 juta itu agar bisa menjadi rumah yang layak. Tapi ada kalanya yang namanya desa ada warganya yang

mengeluh ‘pak saya rumahnya udah mau rubuh’ tapi kepala desa menyanggupi secara spontan tidak dilihat dulu keadaannya swadayaanya ada apa ngga kan kaya gitu ya, begitu di ajukan dapat 7 juta rumah yang mau dipugar tidak punya seanak saudara tidak punya anak, tetangga disituswadayaanya terlalu rendah itu jadi tanggung jawab pak kades, uang 7 juta itu tidak bisa menjadi rumah yang layak huni, makanya triknya harus pendekatan dulu kepada yang mau di pugar”

Setelah melakukan penelitian Desa Gunung langit Kecamatan Kalibening Kabupaten banjarnegara terdapat hal menarik yang ditemukan dengan dana RP. 7.000.000 yang di berikan oleh pemerintah untuk masyarakat menimbulkan permasalahan baru, banyak masyarakat di desa yang hidup masyarakat sudah tidak mengandalkan gotong royong lagi, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan bantuan hanya sebesar RP. 7.000.000 karena hal tersebut bukan hanya untuk memperbaiki rumah dan membuat jamban namun juga harus membayar tukang atau pekerja, belum lagi jika anggaran tersebut melonjak dari perkiraan sebelumnya dan masyarakat harus mengeluarkan uang pribadi supaya untuk memperbaiki rumahnya dapat selesai yang di inginkan,

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu monah di desa Gunung Langit Kecamatan kalibening Kabupaten Banjarnegara selaku penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengatakan bahwa:

“sebenarnya kami mendapatkan bantuan itu kaya siap ngga siap, ngga karena takut mengeluarkan uang sendiri lagi jika ada kekurangan dan harus mermbayar tukang yang bekerja sedangkan kami ngga punya uang, siapnya la wong di bantu masa ngga mau menerima itu sama saja menolak rejeki”

Gambar di bawah merupakan salah satu rumah penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di desa gunung langit yang terlihat sangat jelas bahwa sudah layak untuk di huni dan bebas dari hewan yang mudah masuk ke dalam rumah.

Gambar 3.3
Penerima Bantuan Pemugaran RTLH di Desa Gunung Langit tahun 2016



Sumber: langsung ambil di lapangan oleh peneliti tahun 2018

Namun temuan tersebut sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di Desa Karanggondang Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dengan Dana RP. 7.000.000 yang diberikan dari pemerintah untuk masyarakat yang menerima bantuan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) menjadi layak untuk di huni, dana tersebut bukan langsung di berikan ke masyarakatnya langsung namun di berikan dalam bentuk material, sehingga dana itu benar-benar untuk keperluan yang diperlukan bukan lagi untuk keperluan yang lain. Masyarakat sangat antusias dari mulai sosialisai di Kantor Desa sampai pelaksanaan, dengan bantuan sebesar itu di Desa Karanggondang sangat memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki rumah menjadi layak huni dan untuk membuat jamban sehat, karena di desa Karanggondang sifat gotong royong masyarakat masing relative tinggi dan masyarakat yang menerima bantuan banyak yang bisa menjadi tukang atau ahli bangunan sehingga tidak perlu membayar ongkos untuk orang lain menjadi tukang, sehingga masyarakat antusias membantu memperbaiki rumah jika memang di butuhkan. Pemerintah Desa karanggondang sendiri memilih masyarakat yang menerima bantuan tidak menentukan sendiri namun juga mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar, namun tidak di pungkiri bahwa kecemburuan sosialnya masih banyak karena tidak menerima bantuan.

Hal tersebut dibuktikan wawancara dengan bapak Puji selaku kaur pemerintahan di Desa Kranggondang mengatakan bahwa;

“Kalo di Desa Karanggondang sendiri mas, masyarakatnya si sangat antusias dengar mau menerima bantuan Rp. 7.000.000 untuk memperbaiki rumah, dari awal

masyarakat sudah disosialisasi dan di beri arahan, semua yang menerima bantuan kami kumpulkan di Kantor Desa ini supaya mereka yang mendapatkan bantuan jelas dana itu untuk apa. Dana tersebut bukan uangnya langsung yang diberikan ke masyarakat namun dengan bentuk material, kalo dari atasan suruh kaya gitu supaya nantinya tidak disalah gunakan untuk keperluan lain.

Gambar 3.4
Penerima Bantuan Pemugaran RTLH di Desa Karanggondang
2016

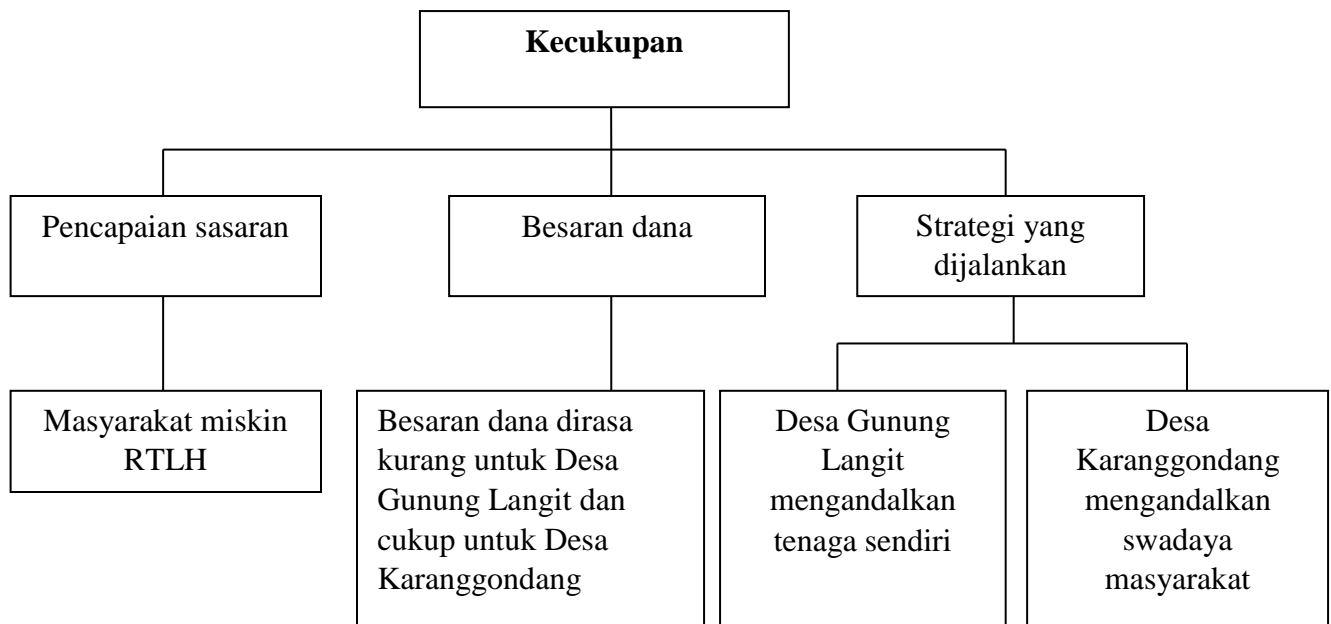


Sumber: langsung ambil di lapangan oleh peneliti tahun 2018

Pencapaian sasaran dengan bantuan sebesar Rp. 7.000.000 banyak yang menganggap bahwa kurang mencukupi dalam biaya renovasi namun juga ada yang menganggap bahwa dengan uang sebesar Rp. 7.000.000 cukup untuk merenovasi rumah. Hal tersebut tergantung dengan wilayah rumah yang di renovasi, contohnya di desa gununglangit bahwa dengan dana yang di beri bantuan oleh pemerintah tidak cukup untuk merenovasi rumah, karena harus di potong untuk membayar tukang ataupun membeli perlengkapan material yang telah dibutuhkan. Namun di Desa karanggondang Kecamatan karangkobar dengan dana yang di beri oleh masysrakat

sudah cukup untuk merenovasi rumah karena di Desa karanggondang swadaya masyarakat untuk bergotong royong masih sangat tinggi jadi tidak perlu memotong biaya untuk membayar tukang.

Bagan 3.3
Kecukupan Program pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016



Sumber: diolah langsung oleh peneliti

Dari indikator kecukupan bahwa pencapaian sasaran sudah sesuai untuk masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak, besaran dana yang didapat oleh pemerintah dirasa kurang untuk masyarakat desa gunung langit karena di desa gunung langit swadaya masyarakat sudah mulai hilang jadi uang 7 juta itu harus kepotong untuk membayar tukang dan dirasa cukup di desa karanggondang karena swadaya masyarakat masih tinggi, dan strategi yang dijalankan di desa

gunung langit masih mengandalkan tenaga sendiri dan perangkat desa namun desa karanggondang masih mengandalkan swadaya masyarakat untuk membantu pemugaran.

4. Pemerataan

Untuk melihat apakah biaya dan manfaat dari program sudah didistribusikan dengan merata pada setiap kelompoknya. Dana Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni yang disalurkan kepada kelompok sasaran adalah sesuai dengan manfaat dan tujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Selain itu manfaat dari Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga sudah dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan nyata oleh masyarakat yang menerima bantuan.

Bantuan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini ternyata membawa kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan, karena kesadaran masyarakat yang kurang. Walaupun rumah warga itu sendiri memang kurang layak, namun orang yang menginginkan bantuan masih bisa bekerja untuk memperbaiki rumahnya, karena dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan untuk bantuan di antaranya : 1) rumahnya para janda dan duda. 2) rumahnya orang yang tidak mempunyai anak maupun saudara. 3) orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Namun semua itu tentu dilihat dari bentuk rumahnya apakah sudah layak

untuk di huni atau belum, kesadaran masyarakat yang harus di tingkatkan dari semua ini. Karena kebanyakan di Kabupaten Banjarnegara ini banyak masyarakat yang lebih mementingkan membeli motor dulu dari pada untuk memperbaiki rumahnya, sehingga itu menjadi pertimbangan lagi buat Dinas.

Hal itu yang disampaikan oleh ibu Ratih Pudji Astutu, S.sos melalui wawancara langsung:

“jadi kadang gini, jadi kadang masyarakat itu kalau tetangganya direhab dapat dana dari bantuan dari pemerintah, sementara diakan mampu dia kerja, mampu tapi memang rumahnya kan belum baiklah, tapi diakan kerja dan kadang kami memprioritaskan rumah, rumah ada yang rumahnya randa, tidak memiliki seanak saudara, rumah duda, tidak mempunyai lapangan pekerjaan itu yang kami prioritaskan dan kadang masyarakat kurang itu, dia masih kekeh dia kerja di jakarta, kerja di apa, tapi memang uangnya belum cukup untuk memperbaiki rumahnya, punya sepeda motor, rumahnya rusak tapi beli sepeda motor, megang hp yang bagus, itu begitu tetap ada yang iri”

Tabel 3.5
Jumlah rumah yang direhab di
Kabupaten Banjarnegara tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah kelompok	Jumlah rumah	Keterangan
1	Pagedongan	12	60	Desa lebak sari, gentan sari, twelagiri, duren, gunung jati, pesangkalan
2	Sigaluh	10	50	Desa Singamerta, wanacipta, kalibenda, sawal, sigaluh, tribuan, prigi, tunggara

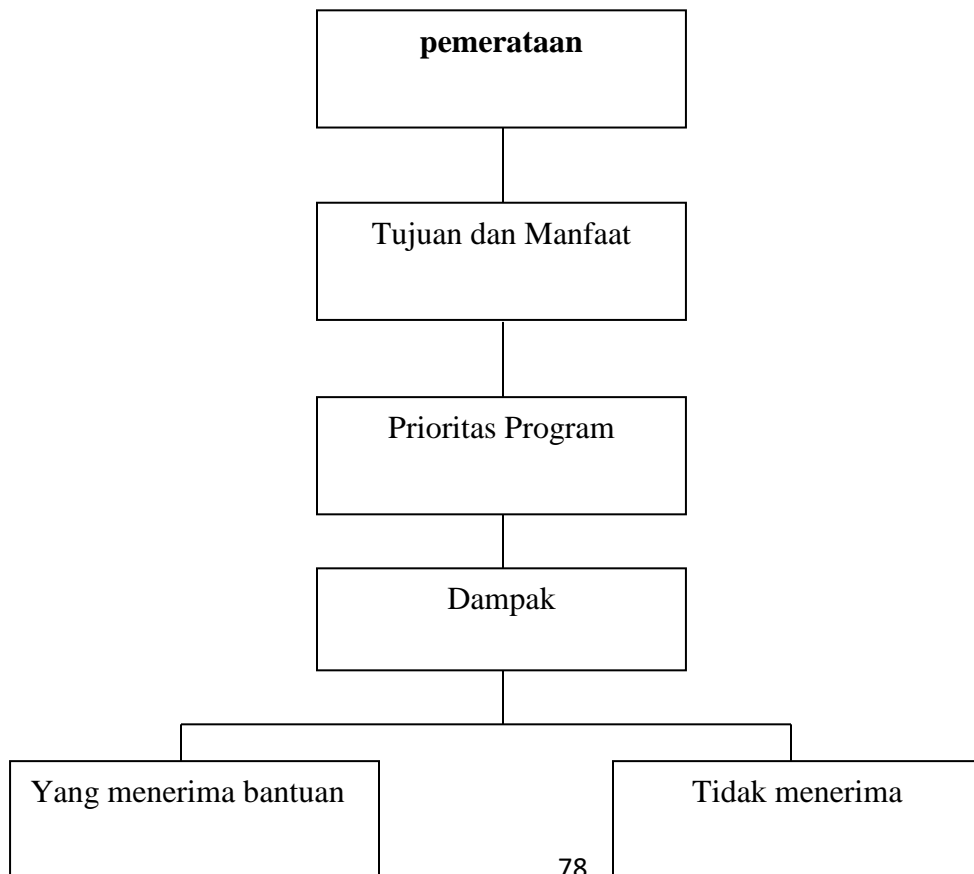
3	Punggelan	23	115	Desa Klapa, badakarya, bondolharjo, petuguran, karangsari, jembatan, tanjungtirto, sawangan
4	Kalibening	9	45	Desa Sirukun, kasinoman, sikumpul, majatengah, bedana, gunung langit, sirukem, plorengan, kalibombong.
5	Purwareja klampok	9	45	Desa Pagak, kalimandi, klampok, kaliwinasih
6	Bawang	12	60	Desa Bandingan, binorong, masaran, majalengka, blambangan, watu urip.
7	Pandanarum	5	25	Desa Pandanarum, beji, sirongge
8	Purwanegara	10	50	Desa Purwanegara, danaraja, mertasari, kutawuluh, kalipelus
9	Madukara	24	120	Desa Karanganyar, pakelen,sered, pagelak, gununggiana, kaliurip, pekauman, penawangan, rakitan, rejasa, kenteng
10	Wanadadi	15	75	Desa Gumingsir, lemahjaya, linggasari, wanakarsa, kasilip, tapen, kandang wangi.
11	Rakit	16	80	Desa Tanung anom, situwangi, lengkong, gelang, badamita, kincang, bandingan
12	Wanayasa	10	50	Desa Tempuran,

				jatilawang, susukan, penanggungan, bantar, kubang.
13	Batur	13	65	Desa Sumberrejo, bakal, pesurenan, dieng kulon, karang tengah.
14	Pejawaran	8	40	Desa Pegundungan, darmayasa, beji, kalilunjar.
15	Karangkobar	5	25	Desa Purwodadi, pagerpelah, karanggondang, paweden, leksana
16	Susukan	4	20	Desa Karangjati, susukan.
17	Banjarmangu	40	200	Desa Banjarmangu, kesenet, gripit, paseh, rejasari, majatengah, kendaga, beji, pekandangan, prendengan, banjar kulon, sijenggung, sipedang, kalilunjar, sijeruk.
18	Banjarnegara	10	50	Desa Tlagawera, karangtengah, sokaandi, semampir
19	Mandiraja	8	40	Desa Kebanaran, jalatunda, blimbing, purwasaba
20	Pagentan	6	30	Desa Nagasari, karangnangka
Jumlah		250	1.250	

*Sumber: Laporan pelaksanaan kegiatan pemugaran RTLH
Kabupaten Banjarnegara tahun 2016*

Berdasarkan data di atas bahwa pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum merata di setiap kecamatan maupun desa karena pengajuan rumah tidak layak huni untuk di Pemugaran/perbaiki di tentukan oleh pihak desa, sebagaimana pihak desa yang paling bertanggung jawab dengan pengajuan program ini dan yang paling mengetahui keadaan dan kondisi adalah pihak desa sendiri. Jadi banyak sedikitnya rumah yang akan di Pemugaran tergantung dengan pihak desa apakah mau mengajukan proposal atau tidak.

Bagan 3.4
Pemerataan Program pemugaran rumah tidak layak huni
di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016



Sumber: diolah oleh peneliti langsung

Dalam indikator pemerataan bahwa jelas tujuannya adalah untuk masyarakat miskin dan dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan yaitu untuk hidup yang lebih sehat, dapat memberikan perlindungan bagi keluarga, dampaknya bagi penerima bantuan adalah bisa hidup lebih sejahtera, dampak bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan adanya kecemburuan sosial.

5. Responsifitas

Untuk menilai apakah hasil kebijakan tersebut memuat preferensi atau nilai yang dapat memuaskan sasaran kebijakan. Kriteria responsifitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari suatu adanya kebijakan. Indikator responsifitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
kriteria responsifitas program RTLH

No	Indikator	Desa gunung langit	Desa Karanggondang
1	Program dapat memuaskan kelompok sasaran	Program rumah tidak layak uni (RTLH) dirasa dapat memuaskan dilihat dari kriteria, efektifitas, efisiensi, dan kecukupan. Walaupun di Desa Gunung Langit tingkat gotong royongnya sudah rendah	Dapat memuaskan kebutuhan masyarakat miskin dari segi tempat tinggal. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan hidup menjadi lebih sehat.
2	Program mempunyai preferensi	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menempati tempat tinggal lebih layak dari sebelumnya	Sama di Desa Gunung Langit yaitu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menempati hidup lebih layak.

Sumber: diolah langsung oleh peneliti

Program rumah tidak layak huni (RTLH) di nyatakan berhasil karena dari wawancara penulis dengan masyarakat yang menerima bantuan ini dapat memuaskan penerima bantuan, karena dengan adanya program rumah tidak layak huni (RTLH) maka masyarakat miskin dapat menempati rumah yang layak untuk dihuni dari pada sebelum menerima bantuan karena dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat msikin, dan hidup menjadi lebih sehat.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh bapak Kidin selaku penerima bantuan tersebut.

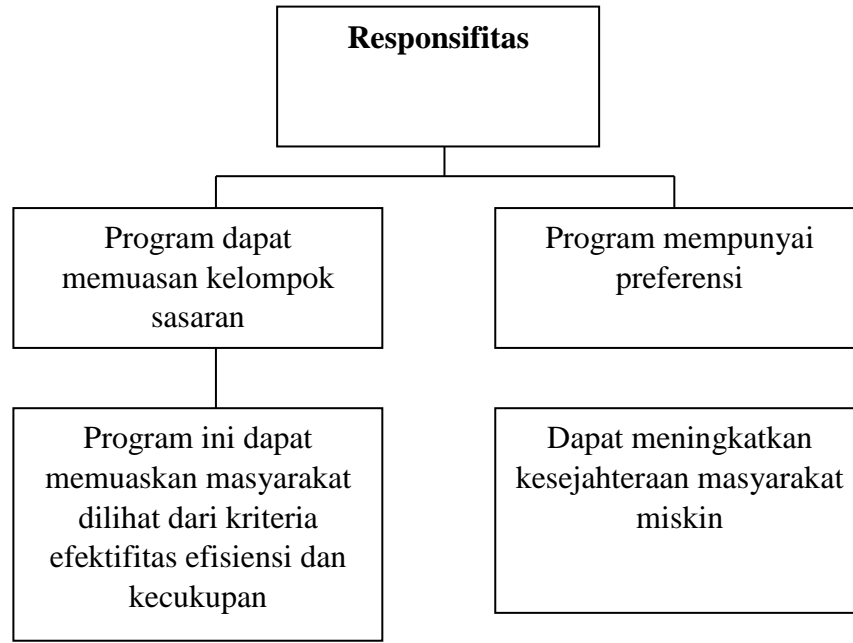
“ya saya sangat berterima kasih banget kepada pemerintah dengan adanya bantuan ini, ini sangat membantu sekali buat keluarga saya. Ya palingg nggak kami sekeluarga sudah enak lah di beri bantuan untuk memperbaiki rumah saya ini”

Sedangkan ibu Ratih pudji Astuti S.sos selaku penanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa:

”tanggapan masyarakat sangat baik sekali dengan adanya program ini, merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, karena penerima merasakan dampak langsung dari pemugaran ini walaupun masyarakat sendiri ada yang mengeluarkan uang pribadi untuk membayar tukang, karena swadaya masyarakatnya sangat rendah ”

Terdapat juga masyarakat yang kekurangan dana karena harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli material atau membayar tukang tetapi mereka juga merasakan manfaat yang positif dari pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH).

Bagan 3.5
Responsifitas Program pemugaran rumah tidak layak huni
di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016



Dalam indikator responsivitas bahwa program dapat memuaskan kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni dan program ini mempunyai preferensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin merasa sangat terbantu dengan adanya program pemugaran rumah tidak layak huni.

6. Ketepatan

Indikator ini merujuk pada hasil yang dicapai dari program tersebut bermanfaat atau tepat kepada kelompok sasaran. Ketepatan merujuk pada tujuan program dan ketepatan sasaran, tujuan dari

program ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara walaupun belum dapat sepenuhnya mengentaskan kemiskinan, setidaknya kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara semakin berkurang setelah adanya program ini.

Tabel 3.7
kriteria ketepatan pada program RTLH

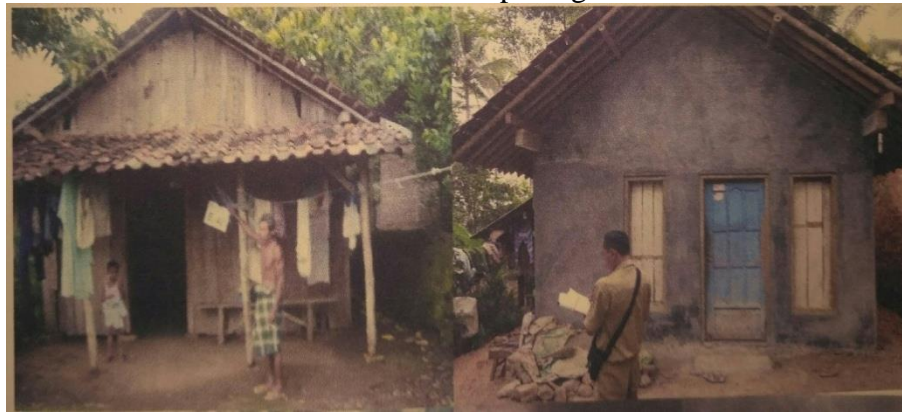
No	Indikator	Desa Gunung Langit	Desa karanggondang
1	Efektifitas program benar-benar berguna dan dirasakan langsung kepada penerima bantuan	Program RTLH pada tahun 2016 hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan programnya dan program dapat berguna bagi masyarakat yang menerima bantuan	Hasil yang diinginkan sudah sesuai dan dapat di rasakan oleh masyarakat miskin
2	Program tepat sasaran	Program sudah terlaksana dengan tepat pada kelompok KK miskin yang ada di Desa Gunung Langit	Sudah tepat sasaran pada kelompok KK miskin sebagai penerima bantuan

Sumber: diolah langsung oleh peneliti

Dari hasil evaluasi bahwa program rumah tidak layak huni (RTLH) di nyatakan berhasil terlaksana dan mencapai tujuan. Program-program pelaksanaan yang dilakukan juga mencapai target

sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dari hasil evaluasi program rumah tidak layak huni (RTLH) juga memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat miskin yang di beri bantuan maupun pemerintah itu sendiri karena dengan adanya program ini maka masalah kemiskinan dapat diminimalkan.

Gambar 3.5
Sebelum dan sesudah pemugaran



Sumber : laporan monev pemugaran RTLH tahun 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa program pemugaran rumah tidak layak huni sudah tepat sasaran untuk masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni untuk dipugar menjadi rumah yang layak huni untuk meningkatkan kenyamanan tempat tinggal harkat dan martabat masyarakat miskin.

Seperti yang di katakan oleh Ibu Ratih Pudji Astuti bahwa:

“program ini kan memang untuk masyarakat miskin yang rumahnya jauh dari kata layak, jadi kami memang semaksimal mungkin memang bantuannya untuk yang membutuhkan, dan kami bekerja sama dengan piha desa setempat karena mereka yang terdekat dan yang paling tau kondisi warganya seperti apa, ya memang program ini benar-benar untuk masyarakat miskin”

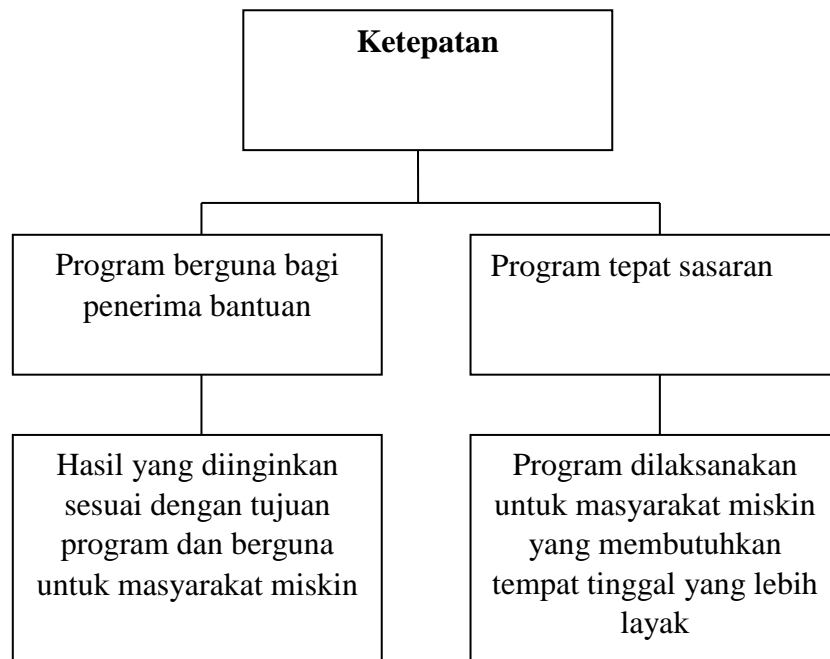
Tidak jauh beda dengan yang dikatakan dengan bapak Cipto selaku perangkat desa:

“yak arena kami yang diamanahkan dari atasan untuk melakukan istilahnya seleksi kaya gitu, jadi kami dari desa benar-benar membuat proposal bantuan pemugaran itu yang namanya tercantum adalah masyarakat yang miskin yang rumahnya jauh dari kata layak lah, karena memang dari pihak desa yang paling tau kondisi warganya seperti ini, namun setelah itu juga di cek lagi sama Dinas, dinas juga ngecek langsung kesini bahwa rumah itu benar-benar layak untuk dipugar apa tidak kaya gitu”

Dari pengamatan dilapangan bahwa program rumah tidak layak huni (RTLH) sangat berguna bagi masyarakat miskin karena dilihat dari sasaran program rumah tidak layak huni (RTLH) adalah pada masyarakat miskin yang langsung menyentuh pada lini kehidupan. Sasaran program rumah tidak layak huni (RTLH) adalah kepada masyarakat miskin yang terbagi menjadi 150 kelompok yang terdapat di 20 Kecamatan 26 Desa dan 13 Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, sebanyak 150 kelompok ini yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penulis sendiri meneliti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai fasilitator, dan terjun langsung kelapangan ke Desa Gunung Langit Kecamatan Kalibening dan Desa Karanggondang Kecamatan Karangkobar, Desa Gunung Langit dan Desa karanggondang terdapat masing-masing 5 rumah yang menerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di pedukuhan.

Bagan 3.6
Ketepatan Program pemugaran rumah tidak layak huni
di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016



Sumber : diolah langsung oleh peneliti

Dalam indikator ketepatan program pemugaran rumah tidak layak huni bahwa program ini sangat berguna bagi masyarakat dan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan program dan program ini sudah tepat sasaran untuk masyarakat miskin yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak huni.

B. Indikator Keberhasilan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

1. Tersedianya rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.

Rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan,

kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya.

Seperti program pemugaran rumah tidak layak huni ini bahwa program ini di khususkan untuk masyarakat miskin, dengan tersedianya rumah yang layak huni maka masyarakat miskin akan merasa terbantu dalam segi financial. Karena rumah merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi masyarakat dan rumah kebutuhan yang paling besar untuk mengeluarkan uang dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan adanya program pemugaran rumah tidak layak huni ini merasa beban hidupnya berkurang.

Senada dengan yang di katakan oleh ibu Ratih Pudji Astuti, S.Sos mengungkapkan bahwa:

“jadi gini mas, program inikan buat masyarakat miskin jadi program ini memang sangat membantu sekali buat masyarakat. karena untung membangun rumah kan persiapannya butuh waktu yang lama, jadi uang terkumpulkan untuk membangun juga lam, maka dengan adanya program ini akan sangat membantu sekali mas”

Gambar 3.6
Rumah layak huni



Sumber: diambil oleh peneliti langsung

Tersedianya rumah layak huni yang di inginkan oleh masyarakat miskin seperti gambar di atas, dengan bantuan sebesar 7 juta untuk melakukan pemugaran rumah layak huni sangat membantu khususnya di desa Gunung Langit dan Karanggondang untuk memberikan kenyamanan pada keluarga.

2. Kenyamanan tempat tinggal, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin.

Rumah hunian atau rumah tinggal adalah sebuah tempat yang ditinggali oleh manusia (penghuni) untuk dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dalam keadaan nyaman. Rumah juga merupakan hal yang sangat vital bagi berlangsungnya kehidupan manusia, karena dengan adanya rumah yang layak maka orang yang menempati akan merasa nyaman untuk berlindung dan terhindar terlindung dari hujan dan panas terik matahari.

Dengan adanya program pemugaran rumah tidak layak huni maka pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sebelumnya untuk meningkatkan berlangsungnya kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik lagi, seperti halnya yang terjadi di desa Gunung Langit dan Karanggondang bahwa masyarakat penerima bantuan merasa sangat terbantu dengan adanya program ini dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin, masyarakat merasa lebih nyaman dan tenang lagi setelah adanya pemugaran rumah tidak layak huni ini karena sudah terbebas dari atap yang bocor.

Hal tersebut senada dengan dengan ibu Rihatin yang mengatakan bahwa:

“ya Alhamdulillah mas, sekarang lebih nyaman dari pada dulu. Dulu kalo hujan pasti harus naruh ember di mana-mana untuk air yang bocor, tidur jadi terganggu/susah mas, tapi sekaran alhamdullilah si sudah lebih nyaman aja karena udah ngga ada yang bocor, kalo ada hujan tidak perlu naruh ember di mana-mana dan bisa istirahat dengan tenang”

Gambar 3.7
Salah satu rumah penerima bantuan RTLH Tahun 2016



Sumber: di ambil langsung oleh peneliti

Gambar di atas menunjukkan bahwa adanya kenyamanan tempat tinggal dalam keluarga yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa beristirahat setelah seharian melakukan aktifitas diluar untuk mencari penghasilan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

3. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan.

Rumah dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai aspek dalam kehidupannya, memahami bahwa keberadaan rumah tidak hanya tempat untuk berlindung namun rumah juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan fungsi-fungsi aspek perlindungan bagi keluarga, bimbingan, dan intelektual atau pertumbuhan pendidikan.

Program pemugaran rumah tidak layak huni sangat membantu dalam aspek dan memenuhi akan kebutuhan seperti melakukan perlindungan untuk keluarga untuk mengurangi resiko dari mara bahaya yang ada disekitar rumah, rumah juga dapat berfungsi sebagai tempat bimbingan kepada keluarga karena dengan rumah yang layak maka bimbingan keluarga akan lebih terjamin lagi dari sebelumnya, tidak hanya itu rumah juga sangat berfungsi dalam hal intelektual atau pertumban pendidikan dalam hal ini pendidikan merupakan kenyamanan yang lebih untuk melalukan belajar yang lebih baik dan lebih nyaman dari sebelumnya, seperti halnya yang terjadi di desa gunung langit bahwa salah satu penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni di jadikan Rumah baca untuk meningkatkan bimbingan dan pendidikan.

Gambar 3.8
Rumah yang di jadikan tempat rumah baca



Sumber: di ambil langsung oleh peneliti

Gambar diatas menunjukan bahwa rumah sangatlah berguna bagi masyarakat, karena dalam hal ini rumah yang layak dapat

memberikan perlindungan, bimbingan bahkan pendidikan dalam keluarga.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat.

Rumah adalah merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimum. Untuk memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi perumahan. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Rumah juga merupakan salah satu bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung penghuninya agar dapat bekerja dengan produktif.

Untuk meningkatkan kesehatan dalam lingkungan masyarakat miskin program pemugaran rumah tidak layak huni tidak hanya semata-mata membangun rumahnya saja, namun program ini juga harus membagi uang 7 juta untuk membangun jamban sehat. Dengan adanya jamban sehat diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sehat lagi, tidak buang air sembarangan seperti di kolam maupun sungai. Pembuatan jamban sehat dan kamar mandi merupakan salah satu

langkah untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada pada masyarakat miskin.

Gambar 3.9
MCK penerima Bantuan



Sumber: diambil langsung oleh peneliti

dengan pembangunan jamban sehat akan meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti gambar di atas bahwa penerima bantuan tidak perlu membuang air besar/kecil ke kolam maupun sungai.

5. Kondisi atap tidak ada yang bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk ke dalam rumah.

Pembangun rumah yang layak huni tentunya harus memenuhi beberapa aspek yang harus di penuhi yaitu kondisi atap yang tidak bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk, sehingga masyarakat yang menempati rumah tersebut akan merasa terlindungi dan jauh dari bahaya. Dinding dan atap merupakan tonggak

utama dalam pembangunan rumah, dinding merupakan pembatas dengan ruangan lainnya, dan atap untuk berlindung dari derasnya hujan dari terik panasnya matahari, sehingga dinding dan atap salah satu indikator keberhasilan program pemugaran rumah tidak layak huni.

Gambar 3 10
Rumah penerima bantuan RTLH Tahun 2016



Sumber: diambil langsung oleh peneliti

Dengan bantuan dari pemerintah untuk melakukan pemugaran seperti halnya gambar di atas menunjukkan bahwa sudah tercapainya indikator keberhasilan yaitu dengan atap yang tidak bocor untuk menghindari terik panas matahari dan hujan serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Rtlh

1. Faktor penghambat

1. Pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan puasa

Terdapat beberapa daerah saat pelaksanaan bertepatan dengan bulan puasa sehingga pelaksanaannya menjadi mundur karena sulit mencari tukang dan masyarakat tidak mau untuk bergotong royong saat pelaksanaan pembangunan tersebut.

2. Musim hujan

Pada pelaksanaan akhir bulan mei sedang musim hujan sehingga penerima bantuan tidak mau ambil resiko karena akan banyak kerusakan saat pembangunan seperti pemasangan semen dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

3. Kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial merupakan suatu kondisi dimana munculnya kelas kelas sosial karena adanya perbedaan perbedaan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Karanggondang dan Desa Gunung Langit bahwa Banyak warga yang merasa iri dengan tetangganya yang menerima bantuan karean warga juga merasa bahwa rumahnya perlu di bantu seperti halnya tetangga yang diberi bantuan.

4. Kurangnya dana untuk pemugaran dan swadaya yang kurang

Dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang diperoleh dari APBD, di beberapa lokasi masih dirasa kurang

mencukupi untuk melaksanakan pemugaran dan Sawadaya Tenaga maupun material masih sangat terbatas di beberapa lokasi sehingga ada beberapa warga yang harus mengeluarkan uang saku sendiri untuk mencukupi kebutuhan.

5. Kearifan lokal.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Seperti yang terjadi di beberapa lokasi yang menerima bantuan masih berlakunya hukum adat yang harus dijalankan yaitu dengan barengnya kegiatan warga panen raya menurut adat yang berlaku manakala musim panen tiba maka seluruh aktifitas di hentikan untuk menyelesaikan panen raya, dan juga terdapat beberapa yang masih mempercayai hari baik untuk membangun rumah.

2. Faktor pendorong

1. Adanya pendampingan dari pihak Desa kepada keluarga penerima bantuan dari pengajuan proposal sampai pelaksanaan pemugaran. Pemerintah desa juga terlibat langsung saat pelaksanaan pemugaran tidak hanya memantau saja. Hal tersebut sangat membantu masyarakat dalam administrasi maupun pelaksanaan.
2. Untuk menangani kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, pemugaran rumah tidak layak huni tidak hanya

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun pemugaran rumah tidak layak huni ini di bantu oleh CSR, dinas-dinas terkait (Dinas pendidikan dan Olah Raga), dan TNI Manunggal Membangun Desa untuk melaksanakan program pemugaran.